

# **ANALISIS PENETAPAN SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL**



## **SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**Andry Sujana  
NIM. C2B605115**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Andry Sujana  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B605115  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP  
Judul Skripsi : **“Analisis Penetapan Satuan Wilayah  
Pembangunan Di Kabupaten Tegal”**  
Dosen Pembimbing : Drs. Nugroho SBM, MT

Semarang, April 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. Nugroho SBM, MT)

NIP. 196105061987031002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Andry Sujana  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B0605115  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
  
Judul Skripsi : “Analisis Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan  
Di Kabupaten Tegal”.

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 April 2011**

Tim Penguji

1. Drs. Nugroho SBM, MT ( ..... )
2. Dr. R. Mulyo Hendarto, MSP ( ..... )
3. Drs. Maruto Umar Basuki, MSi ( ..... )

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andry Sujana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Analisis Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Tegal” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, April 2011  
Yang membuat pernyataan,

Andry Sujana  
NIM : C2B605115

## **HALAMAN MOTTO**

Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan

Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yang  
abadi

Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan

Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan

Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang  
diberikan Tuhan

Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan

Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati

Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa berarti

Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan

Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju surga

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

- Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya selama ini.
- Skripsi ini kupersembahkan untuk : Kedua orang tuaku tercinta dan Ke-5 saudaraku.
- Diyan, "Seseorang yang menyentuh raga ini dengan jemari hati, semangat, dan kasih sayang.."

## ABSTRAK

Pembangunan daerah otonom sekarang ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan wilayah melalui kebijakan pembangunan daerah. Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena perbedaan potensi wilayah, perbedaan fasilitas pelayanan publik atau karena kurangnya koordinasi pelaksana pembangunan. Dalam usaha pembangunan wilayah tersebut, konsep Satuan Wilayah Pembangunan merupakan salah satu konsep yang sangat sesuai untuk diterapkan. Selain itu penetapan Satuan Wilayah Pembangunan dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal, kekuatan interaksi antar kecamatan tersebut, mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan Satuan Wilayah Pembangunan mana saja yang dapat ditetapkan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi antar kecamatan dan pusat pertumbuhan tersebut. Dalam pencapaian tujuan tersebut digunakan metode analisis *Location Quotient*, analisis gravitasi dan analisis skalogram dengan data berupa PDRB kabupaten, PDRB tiap kecamatan, PDRB perkapita tiap kecamatan, jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan, serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 4 Satuan Wilayah Pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Tegal antara lain SWP I meliputi Kecamatan Slawi, Dukuhturi, Talang, Tarub, Adiwerna, Pangkah, Dukuhwaru, Lebaksiu, Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng, SWP II meliputi Kecamatan Kramat, Wrureja dan Kecamatan Suradadi. SWP III meliputi Kecamatan Margasari, Pagerbarang dan Kecamatan Balapulang, serta SWP IV meliputi Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong.

Kata Kunci : Satuan Wilayah Pembangunan, *Location Quotient*, Gravitasi, Skalogram, Tegal

## **ABSTRACT**

*Nowadays, the developments of autonomous areas are expected to be the solution of areal defect, through the implementations local development policies. The defect might be the result of the potential differences among each area, the public service facility differences, or the lack of coordination in development practices. In the struggle of the areal building, concept of Development Areal Unit is the most appropriate to be applied. Furthermore, the fulfillment of Development Areal Unit can be used as a tool for government to make it easier in coordinating the executions of local development.*

*There are several aims of this research. The first, to find out the economical potencies that can be grown in each subdistrict in Tegal Regency; the second, to find out the interactional strength among the districts, the third, to find out about which subdistricts that can be fulfilled based on the local potencies, and the fourth is to find out the interactional strength between districts and the centre of the growth. Location Quotient, Gravitation and Scalogram analyses within the data including regency's PDRB, subdistricts' PDRB, PDRB per-capita in each district, population quantities, distances among the district's capital, and the quantities and types of service facilities available in each subdistrict in Tegal Regency.*

*The result of the analysis showed that there were 4 Development Area Unit that is identified in Tegal Regency. They were SWP I, including Slawi, Dukuhhuri, Talang, Tarub, Adiwerna, Pangkah, Dukuhwaru, Lebaksiu, Jatinegara, and Kedungbanteng subdistricts; meanwhile, SWP II, including Kramat, Wrureja, and Suradadi subdistricts. SWP III, including SWP Margasari, Pagerbarang, and Balapulang subdistricts; and SWP IV, including Bumijawa and Bojong subdistricts.*

*Keywords : Development Areal Unit, Location Quotient, Gravitation, Scalogram, Tegal Regency*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan bermacam kenikmatan tiada ternilai harganya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Tegal” Adalah suatu hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro beserta Staf pengajar, Staf Administrasi, Tata Usaha serta Staf keamanan dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang selama ini membantu proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Drs. Nugroho SBM, MT selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, solusi, dan kebijaksanaannya selama ini.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE., Msi selaku Koordinator Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terimakasih atas kebijaksanaan serta motivasinya kepada Penulis.
4. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama Penulis belajar di Fakultas Ekonomi Undip.
5. Ayah dan Ibu, Bapak Sujana dan Ibu Hikmah atas segala kepercayaan, dukungan, materi, fasilitas, serta tak lupa terimakasih atas doanya .
6. Saudara kandungku Kak Yudha, Kak Iik, Kak Iin, Kak Lilis, DD, Mba Hani, Dang Zulham, Mas Indra terimakasih atas segala motivasinya.
7. Diyan atas semua dukungan moril, motivasi supaya nggak males buat skripsinya, dan terimakasih doanya
8. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam perolehan data.
9. Seluruh keluarga besar IESP 05 : Dimas Gadang, Andi, Anto, Prima, Cholif, Edwin, Panji, Deva, Pradana, Reza, Pipit, Hera, Wiwid, Prist, Glor,

Ria, Hafid, Indah, Ruth, Roni, Ariska, Fita, Dini, Naning, Mbak Dinar, ,  
Hawik, Iwan, Bono, Candra, Ibonk, Bowo, Gilang, dan Yardin (gak nyesel  
punya teman seperti kalian).

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ikut mendo'akan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, April 2011

Andry Sujana  
NIM : C2B60515

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian .....	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	16
2.1.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1.1 Teori Sektor Basis .....	16
2.1.1.2 Interaksi Spasial.....	18
2.1.1.3 Pusat Pertumbuhan ( <i>Growth Pole</i> ) .....	20
2.1.1.4 Teori Tempat Sentral.....	23
2.1.1.5 Pengertian Daerah .....	24
2.1.1.6 Ruang dan Perwilayahan .....	25
2.1.1.7 Penetapan Wilayah Pembangunan .....	26

	2.1.2 Penelitian Terdahulu.....	28
	2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	31
	3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
	3.3 Metode Pengumpulan Data .....	32
	3.4 Metode Analisis.....	33
	3.4.1.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) .....	33
	3.4.1.2 Analisis Gravitasi .....	34
	3.4.1.3 Analisis Skalogram .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS</b>	
	4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	37
	4.1.1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah .....	37
	4.1.2. Wilayah Administratif .....	39
	4.1.3. Demografis .....	41
	4.2. Hasil Analisis .....	42
	4.2.1. Metode Analisis .....	42
	4.2.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) .....	42
	4.2.2 Analisis Gravitasi.....	47
	4.2.3 Analisis Skalogram .....	53
	4.3. Interpretasi Hasil Analisis.....	61
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	
	5.1. Kesimpulan.....	72
	5.2. Saran.....	75
	Daftar Pustaka .....	79
	Lampiran .....	81

## Daftar Tabel

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Dan Penyebarannya Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tegal 2010 ...	5
Tabel 1.2	Visi Misi Dan Pilar Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal .....	6
Tabel 1.3	Produk Domestik Regional Buto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tegal 2005-2009....	8
Tabel 1.4	Jumlah Dan Jenis Fasilitas Pelayanan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Tegal .....	10
Tabel 4.1	Tata Guna Lahan Di Kabupaten Tegal Tahun 2010.....	37
Tabel 4.2	Jumlah Desa / Kelurahan Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Tegal .....	38
Tabel 4.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Dan Penyebarannya Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tegal 2010 ...	40
Tabel 4.4	Nilai Rata-Rata LQ Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Tegal Tahun 2007-2010 .....	41
Tabel 4.5	Indeks Gravitasi Antar Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tegal.....	49
Tabel 4.6	Kekuatan interaksi Antar Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tegal.....	50
Tabel 4.7	Peringkat Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk .....	53
Tabel 4.8	Peringkat Kota Berdasarkan Jumlah Fasilitas.....	54
Tabel 4.9	Pengurutan Jenis Fasilitas Berdasarkan Jumlah Total Unit Fasilitas dan Jumlah Wilayah yang Memiliki.....	55
Tabel 4.10	Kelompok Kecamatan Berdasarkan Jumlah dan Jenis Fasilitas.....	58
Tabel 4.11	Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Tegal.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	28
Gambar 4.1 Peta Letak Kabupaten Tegal Dalam Propinsi Jawa Tengah .....	35
Gambar 4.2 Peta Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Tegal.....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hasil Analisis	Halaman
Lampiran A	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> .....	82
Lampiran B	Hasil Perhitungan Analisis Gravitasi .....	91
Lampiran C	Hasil Analisis Skalogram .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan pembatasan administratif dari tingkat paling rendah hingga tingkat tertinggi. Dalam masa otonomi daerah saat ini setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut. Adapun tujuan otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui demokratisasi pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengertian otonomi daerah terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi yaitu *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dengan demikian, otonomi dalam pembangunan regional merupakan hak mengurus rumah tangga sendiri dalam satu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah, yang dalam pelaksanaannya lebih membeikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemetaan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah (Sarundajang, 1998 dalam Joko Christanto, 2002).

Keragaman potensi dan kondisi kewilayahan dapat memicu konflik antar sektor yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam masyarakat. Salah satu masalah yang timbul adalah adanya pembangunan yang tidak merata, sehingga ada daerah yang cepat pembangunannya dan ada pula daerah yang sangat lambat pembangunannya. Dalam hal inilah pemerintah perlu merumuskan kebijakan

pembangunan regional. Menurut Sjafrizal (2008), untuk merumuskan kebijakan pembangunan regional yang baik dan terarah, perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai. Ada 2 alternatif sasaran kebijakan pembangunan regional, yaitu :

- a. Mewujudkan kemakmuran wilayah (*Place Prosperity*). Dalam hal ini kondisi umum yang diinginkan sebagai hasil dari pembangunan adalah terwujudnya kondisi fisik daerah yang maju meliputi prasarana dan sarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan lain-lain.
- b. Mewujudkan kemakmuran masyarakat (*People Prosperity*). Tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada pembangunan penduduk setempat. Dalam kaitan dengan hal ini, program dan kegiatan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan seluruh daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW sebagai rencana struktur tata ruang bertujuan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan menghindari terjadinya pemusatan kegiatan yang berlebihan agar terjamin keserasian untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dan seimbang dengan pola pemanfaatan tata ruang seoptimal mungkin dengan penyebaran prasarana dan sarana sosial dan kecenderungan yang berlaku

di lapangan. Menurut Erman Rustiadi (227) secara spesifik penataan ruang dilakukan sebagai :

1. Optimasi pemanfaatan sumberdaya
2. Alat dan wujud pemetaan sumber daya dengan asas pemerataan, keberimbangan dan keadilan
3. Menjaga kelanjutan (*sustainability*) pembangunan.

Salah satu karakteristik penting dari konsep perencanaan wilayah adalah mempertimbangkan sebanyak mungkin variasi kondisi sosial ekonomi daerah ke dalam perencanaan. Untuk dapat merumuskan strategi, kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah setempat, penerapan konsep Wilayah Pembangunan merupakan alat perencanaan yang bermanfaat (Sjafrizal, 2008).

Satuan Wilayah Pembangunan merupakan salah satu strategi pembangunan struktur tata ruang. Satuan Wilayah Pembangunan memiliki pusat Wilayah Pembangunan (*Growth Pole*) sebagai penggerak pembangunan wilayah berdasarkan potensi dan kendala yang dimilikinya serta peningkatan akses ke pusat Satuan Wilayah Pembangunan dan antar pusat Wilayah Pembangunan. Setiap pusat pembangunan akan memberikan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruh di sekitarnya (*hinterland*). Secara umum ada 4 bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam ekonomi regional sebagai dasar penetapan wilayah pembangunan regional, yaitu :

1. Kesamaan kondisi permasalahan dan potensi umum daerah baik ekonomi, sosial dan geografi (*Homogeneous Region*)

2. Keterkaitan yang erat antara daerah-daerah yang bergabung dalam Wilayah Pembangunan yang bersangkutan (*Nodal Region*)
3. Kesamaan karakteristik geografis antar daerah yang tergabung dalam Wilayah Pembangunan tersebut (Wilayah Fungsional)
4. Kesatuan wilayah administrasi pemerintahan antara provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam Wilayah Pembangunan yang bersangkutan (*Planning Region*).

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Satuan Wilayah Pembangunan dapat ditetapkan berdasarkan aspek kesamaan karakteristik sosial ekonomi, keterkaitan ekonomi antar wilayah dan tidak memotong daerah administrasi agar tidak memicu konflik. Untuk itu perlu diketahui potensi ekonomi masing-masing wilayah, kekuatan interaksi antar wilayah dan pusat pertumbuhan. Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijaksanaan pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan jelas dan tegas sampai dimana wilayah cakupannya. Dengan demikian, perumusan pembangunan wilayah dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai dengan kondisi permasalahan dan potensi wilayah serta kewenangan pemerintah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008).

Kabupaten Tegal memiliki wilayah seluas 87.879 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 1.420.760 jiwa, serta kepadatan penduduk 1.617 jiwa per km<sup>2</sup>. Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan karakteristik ekonomi berbeda dengan berbagai potensi ekonomi di masing-masing kecamatan. Dengan tiga kecamatan yang langsung berbatasan dengan laut Jawa (pesisir), tiga kecamatan yang berada di wilayah dataran tinggi (pegunungan) dan 12 kecamatan

menyebar di dataran rendah sedang dan tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka keadaan perekonomian kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal sangat bervariasi. Luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

**TABEL 1.1**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK**  
**DAN PENYEBARANYA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN**  
**TEGAL**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Margasari	86.83	103.145	1.118
2	Bumijawa	88.56	95.270	1.076
3	Bojong	58.52	71.667	1.225
4	Balapulang	74.91	90.285	1.205
5	Pagerbarang	43.00	60.432	1.405
6	Lebaksiu	40.95	88.843	2.170
7	Jatinegara	79.62	60.826	1.764
8	Kedungbanteng	87.62	42.981	1.491
9	Pangkah	35.51	101.397	2.855
10	Slawi	13.89	68.025	4.897
11	Dukuhwaru	26.30	58.815	2.236
12	Adiwerna	23.86	125.205	5.247
13	Dukuhturi	17.48	98.286	5.623
14	Talang	18.39	96.328	5.238
15	Tarub	26.82	78.367	2.922
16	Kramat	38.49	103.368	2.686
17	Suradadi	55.73	86.345	1.549
18	Warureja	62.31	66.359	1.065
<b>Jumlah</b>		<b>878.79</b>	<b>1.495.944</b>	<b>1.702</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2010

Kabupaten Tegal merupakan daerah yang menitikberatkan perekonomian pada sektor perdagangan dan industri. Namun saat ini pemerintah mulai mengarahkan pengembangan pada sektor lain seperti sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam visi misi pemerintah Kabupaten Tegal yang dapat dilihat dalam Tabel 1.3

**TABEL 1. 2**  
**VISI MISI DAN PILAR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

<b>Visi</b>	Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan mandiri berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
<b>Misi</b>	<p>Mewujudkan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,</p> <p>Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha</p> <p>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <p>Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan local</p> <p>Mewujudkan tata pemerintahan yang baik</p>
<b>Pilar Utama Pembangunan Kabupaten Tegal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian</li> <li>2. Perdagangan</li> <li>3. Industri</li> <li>4. Pariwisata</li> </ol>

Sumber : BAPPEDA Kab.Tegal, 2010

Sesuai dengan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka perlu adanya perhatian yang lebih fokus terhadap perencanaan pembangunan daerah baik secara sektoral maupun spasial untuk meminimilasi ketimpangan daerah yang akan terjadi. Ketimpangan daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 1.4 yang menunjukkan kondisi perekonomian masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal.

**TABEL 1.3**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BUTO (PDRB) ATAS DASAR**  
**HARGA BERLAKU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TEGAL**  
**2005-2009**  
**(JUTA RUPIAH)**

No	Kec	2005	2006	2007	2008	2009
1	Margasari	1.576.402,83	1.612.075,48	1.711.027,81	3.139.609,89	3.448.343,00
2	Bumijawa	1.102.623,43	1.217.349,13	1.417.349,48	1.984.955,77	2.232.314,53
3	Bojong	1.446.455,89	1.662.078,78	1.962.095,79	2.926.103,44	3.324.939,68
4	Balapulang	1.627.430,60	1.651.670,78	2.071.850,48	2.956.236,89	3.311.272,26
5	Pagrbarang	1.421.069,20	1.631.975,27	2.051.754,79	2.750.109,86	3.100.345,25
6	Lebaksiu	1.709.767,21	1.812.819,67	2.151.978,47	3.215.738,68	3.605.085,63
7	Jatinegara	1.261.533,70	1.463.955,95	1.756.980,15	2.455.533,69	2.773.783,58
8	K.banteng	1.306.263,15	1.680.494,60	1.950.784,50	2.942.107,84	3.281.880,19
9	Pangkah	1.197.195,62	1.436.176,79	1.689.760,77	2.735.969,95	3.023.523,77
10	Slawi	2.798.880,40	3.131.368,40	4.032.965,70	5.918.057,67	6.602.993,95
11	Dukuhwaru	1.239.354,75	1.628.055,86	2.076.135,46	3.014.180,95	3.366.213,92
12	Adiwerna	1.865.924,30	2.092.749,86	3.165.670,77	4.074.571,04	4.536.140,89
13	Dukuhturi	2.017.435,57	2.309.829,66	3.320.765,76	4.318.596,37	4.867.899,60
14	Talang	1.267.731,11	1.316.668,62	2.176.698,32	3.605.238,77	3.999.220,77
15	Tarub	2.054.609,93	2.427.726,92	2.607.570,48	2.909.437,68	3.262.822,31
16	Kramat	2.564.223,07	2.872.545,05	3.692.206,75	5.042.740,35	5.580.752,48
17	Suradadi	1.393.863,53	1.474.245,25	1.757.845,77	2.900.561,63	3.207.946,93
18	Warureja	1.577.825,69	1.556.659,34	1.907.645,25	2.796.671,19	3.057.946,93
<b>Jumlah</b>		<b>1.661.069,46</b>	<b>1.849.690,27</b>	<b>2.570.630,77</b>	<b>3.370.378,10</b>	<b>3.757.526,53</b>

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Tegal 2005-2009, BPS Tegal

Selain dengan melihat PDRB Kabupaten, ketidakmerataan pembangunan daerah dapat dilihat dari perbedaan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat dalam daerah tersebut. Perbedaan yang sangat mencolok dalam ketersediaan fasilitas pelayanan dapat menunjukkan bahwa terdapat daerah yang kurang mengalami pertumbuhan baik sosial maupun ekonomi. Kurang memadainya fasilitas pelayanan akan mendorong lambatnya pertumbuhan satu daerah. Pada Tabel 1.5 dapat diketahui jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal.

**TABEL 1.4**  
**JUMLAH DAN JENIS FASILITAS PELAYANAN BERDASARKAN**  
**KECAMATAN DI KABUPATEN TEGAL**

No	Kecamatan	Fasilitas Pelayanan									
		Ekonomi		Pendidikan		Kesehatan		Peribadatan		Total	Jenis
		Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis		
1	Margasari	34	4	75	4	86	3	294	2	489	13
2	Bumijawa	28	5	67	4	27	3	391	2	513	14
3	Bojong	30	4	37	4	73	3	272	2	412	13
4	Balapulang	29	4	72	4	100	3	266	3	467	14
5	Pagerbarang	16	4	42	4	20	4	156	2	234	14
6	Lebaksiu	31	4	68	4	22	3	255	2	376	13
7	Jatinegara	18	3	35	3	21	3	250	2	324	11
8	Kedungbanteng	28	3	38	4	15	3	153	2	234	12
9	Pangkajene	53	5	88	4	22	3	339	2	502	14
10	Slawi*)	118	5	129	6	38	5	166	5	451	21
11	Dukuhwaru	23	3	48	5	70	3	153	2	294	13
12	Adiwerna	111	4	99	5	77	5	347	2	634	16
13	Dukuhturi	40	4	69	4	101	5	227	2	437	15
14	Talang	83	4	76	4	55	3	237	2	451	13
15	Tarub	24	3	65	4	27	3	246	2	362	12
16	Kramat	71	5	80	4	51	5	190	3	392	17
17	Suradadi	32	5	49	4	60	4	220	2	361	15
18	Warureja	14	3	40	4	37	4	155	2	246	13

Sumber : Tegal Dalam Angka 2010

\*) Ibukota Kabupaten

Permasalahan di Kabupaten Tegal adalah ketidakmerataan pembangunan sehingga menimbulkan disparitas antar wilayah. Ketidakmerataan penyebaran sumber daya alam dan pembangunan fasilitas sosial ekonomi menyebabkan pertumbuhan wilayah juga tidak merata. Upaya pemerataan guna mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah akan terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Salah satu yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan melalui kebijaksanaan pembangunan wilayah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal tahun 2005-2025 dengan membentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah. Dimana kabupaten Tegal ini terdiri dari 4 (empat) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

Kebijakan pengembangan wilayah dengan pusat pertumbuhan juga diterapkan di Kabupaten Tegal sesuai dengan kebijakan penataan ruang daerah di Jawa Tengah yang berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pemanfaatan wilayah strategis pertumbuhan, stagnan, konservasi, dan wilayah perbatasan bagi kepentingan pembangunan regional, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem sarana dan prasarana wilayah untuk menjamin keterkaitan yang semakin erat antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah di belakangnya, pusat distribusi dan produksi, dan keserasian pembangunan antar kota dan kota dengan desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perbedaan potensi alam dapat memicu konflik antar sektor dalam proses pembangunan dan dapat menimbulkan dampak baik positif ataupun negatif bagi kelompok masyarakat tertentu secara keseluruhan. Disamping itu, perbedaan potensi daerah ditiap-tiap kecamatan dapat menyebabkan adanya daerah tertentu yang menikmati sendiri hasil penggunaan sumber daya tersebut. Dengan adanya masalah-masalah tersebut akan timbul ketimpangan wilayah. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki ketimpangan wilayah yang tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari PDRB Kabupaten. Dimana ada beberapa kecamatan yang mendominasi PDRB Kabupaten dan ada juga kecamatan yang

memiliki PDRB yang jauh lebih kecil. Ketimpangan tersebut ditengarai disebabkan oleh ketidaktepatan penetapan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Untuk lebih memahami topik yang akan dibahas dalam penelitian ini maka akan dimunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana interaksi antar kecamatan di Kabupaten Tegal ?
3. Satuan Wilayah Pembangunan apa saja yang dapat ditetapkan di Kabupaten Tegal berdasarkan potensi daerah tiap kecamatan, kekuatan interaksi antar kecamatan dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tegal tersebut ?
4. Apakah Satuan Wilayah Pembangunan yang sudah ditetapkan sesuai dengan kaidah perencanaan ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang ada di Kabupaten Tegal serta menganalisis bagaimana Wilayah Pembangunan dapat ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Tegal secara teoritis dan sesuai dengan permasalahan yang ada di kabupaten tersebut. Secara ringkas tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal.

2. Menganalisis kekuatan interaksi antar kecamatan di Kabupaten Tegal.
3. Mengetahui kecamatan apa yang dapat ditetapkan sebagai pusat Satuan Wilayah Pembangunan atau kutub pertumbuhan untuk mendorong pembangunan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan tersebut di Kabupaten Tegal.
4. Mengetahui Satuan Wilayah Pembangunan mana saja yang dapat ditetapkan berdasarkan potensi daerah tiap kecamatan, kekuatan interaksi antar kecamatan dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tegal tersebut ?
5. Kesesuaian hasil analisis dan kaidah perencanaan dengan Satuan Wilayah Pembangunan yang sudah ditetapkan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Selain sebagai sarana dan proses pembelajaran mengenai pembangunan wilayah, juga diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Tegal agar kebijaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan potensi wilayah. selain itu, akan mempermudah pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah pada Wilayah Pembangunan masing-masing yang bermuara pada pertumbuhan wilayah yang lebih merata di bawah control pemerintah daerah.

2. Memberikan masukan tentang analisis pembangunan wilayah di tempat penelitian, sehingga dapat dijadikan tambahan ilmu dalam pembangunan regional dan juga sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Memberikan gambaran secara langsung tentang bagaimana teori yang diterima selama mengikuti perkuliahan dapat diterapkan dalam dunia praktek dan dapat memperluas wawasan tentang konsep pembangunan wilayah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini akan dibahas tentang landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan variabel yang digunakan dalam penelitian beserta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan mencakup deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan.

## 5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dari penelitian yang menggunakan pernyataan singkat yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Teori Sektor Basis**

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam Negara maupun ke luar negeri. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah karena kegiatan basis. Analisis basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah ataupun lapangan pekerjaan.

Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan sektor jasa atau pelayanan atau disebut juga sektor non basis. Sektor non basis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor non basis tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tersebut.

Cara memilih kegiatan basis dan non basis menurut Robinson Tarigan (2004) antara lain :

1. Metode langsung, yang dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan darimana mereka membeli bahan kebutul<sub>16</sub>uk mengasilkan produk tersebut. Kemudian akan ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan yang dipasarkan kedalam wilayah.

2. Metode tidak langsung, yang dilakukan dengan menggunakan asumsi atau disebut juga metode asumsi. Dalam metode ini berdasarkan kondisi wilayah tersebut (data sekunder) ada kegiatan yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah dianggap sebagai sektor basis jika mayoritas produk hanya dijual ke dalam wilayah, maka disebut sebagai sektor non basis.
3. Metode campuran, yang merupakan gabungan dari metode langsung dan metode tidak langsung.
4. LQ (*Location Quotient*), yaitu metode yang membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah lokal dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.
5. Analisis *Shift-Share*. Metode ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya pergeseran dari hasil pembangunan perekonomian daerah jika daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Rahrdjo Adisasmita (2005) mengatakan bahwa bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan timbul kenaikan volume kegiatan non basis dan sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu

wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis.

Dalam Syafrijal (2008), perekonomian suatu daerah merupakan penjumlahan dari sektor basis dan sektor non basis yang dipresentasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = B + S \dots\dots\dots (1)$$

Dimana: Y = Pendapatan daerah  
B = Sektor basis  
S = Sektor nonbasis

### **2.1.1.2 Interaksi Spasial**

Interaksi menurut Yoseph R. Roucek (1963) dalam Bintarto (1984) merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar atau melalui surat kabar.

Sementara itu menurut Rug (1979) interaksi spasial merupakan wujud dari adanya hubungan antara tempat yang satu dengan yang lainnya melalui arus pergerakan yang dapat berupa arus migrasi, komunikasi dan transportasi (Catur Widodo, 2003).

Pengertian interaksi spasial menurut Edward Ulman (1954) dalam Daldjoeni (1992) diestimasi berdasarkan tiga faktor, yaitu:

1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu wilayah yang berbeda sumber daya sehingga terjadi aliran yang sangat besar dan membangkitkan interaksi spasial yang tinggi.

2. Kesempatan beinteraksi, yaitu kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. Hal ini terjadi karena adanya daerah yang menghambat arus komoditi antar daerah-daerah yang dapat beinteraksi
3. Kemudahan transfer dalam ruang, yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, yang termasuk karakteristik khusus dari komoditi yang ditansfer. Arus transfer yang dapat terjadi antara lain berupa :
  - Arus ekonomi : barang, penumpang KA, jalan
  - Arus sosial : pelajar, mahasiswa, pedagang
  - Arus politik : pengeluaran pemerintah
  - Arus informasi : telegram, telepon

Inteaksi spasial terdiri dari (Rondinelli, 1978) :

1. Keterkaitan fisik, berbentuk integrasi manusia melalui jaringan transportasi baik alami maupun rekayasa
2. Keterkaitan ekonomi, berkaitan erat dengan pemasaan sehingga terjadi aliran komoditas sebagai jenis bahan dan barang manufaktur serta modal dan keterkaitan produksi ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*) diantara berbagai kegiatan ekonomi.
3. Keterkaitan kependudukan, terjadi dari pola migrasi baik permanen maupun kontemporer.
4. Keterkaitan teknologi, terutama peralatan, cara dan metode produksi harus terintegrasi secara spasial dan fungsional.

5. Keterkaitan sosial yang merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola hubungan sosial penduduk.
6. Keterkaitan pelayanan sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dsb.
7. Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan misalnya pada struktur perbatasan administrasi maupun sistem anggaran dan biaya pembangunan.

#### **2.1.1.3 Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)**

Teori Pusat pertumbuhan (*Growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*Pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha – usaha tersebut. Tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu :

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor

lainnya, karena saling terkait (sektor pertama yang meningkat pemintaannya).

2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor – sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan.

3. Adanya Konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antar sektor – sektor yang saling membutuhkan juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bias mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat dipeoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota menarik untuk dikunjungi dank arena volume tansaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economies of scale* sehingga tercipta efisiensi lanjutan.

4. Bersifat mendorong daerah belakangnya

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat

hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong belakangnya mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong belakangnya.

Tiga konsepsi utama dari teori *growthpole* adalah *leading sektor*, polarisasi dan *spread effect*. Sementara itu, faktor-faktor yang memungkinkan suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan adalah :

1. Lokasi yang strategis dalam kaitannya dengan lalu lintas regional, nasional, dan internasional
2. Memiliki daerah *hinterland* dengan potensi produksi yang besar
3. Kegiatan industri yang maju dan berkembang
4. Keterampilan dan keuletan masyarakat, serta keunggulan atau ketangguhan pemimpinnya.

Konsentrasi dan saling berkaitan merupakan faktor penting dalam setiap pusat pertumbuhan karena akan menciptakan berbagai aglomerasi ekonomi. Adanya pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya akan menyebabkan perkembangan jaringan interaksi untuk meningkatkan perekonomian setempat.

Penggabungan antara teori pusat pertumbuhan dan teori basis ekonomi akan menentukan sektor apa yang akan dikembangkan. Hal ini berarti bahwa

potensi daerah-daerah yang bersangkutan secara komparatif memegang peranan penting dalam sektor yang potensial untuk diprioritaskan.

Dalam Rahardjo Adisasmita (2005) dikatakan bahwa selama ini teori kutub pertumbuhan dianggap gagal karena tidak berhasil membuktikan terjadinya dampak tetesan ke bawah secara lugas. Hal ini terjadi karena pusat pertumbuhan pada umumnya adalah kota-kota besar, sehingga dampak polarisasinya lebih besar daripada dampak tetesan ke bawahnya. Selain itu kegagalan teori pertumbuhan juga dilaksanakan pemerintah lebih banyak diaahkan pada wilayah perkotaan.

#### **2.1.1.4 *Central Place Teori* (Teori Tempat Sentral)**

Christaller (1933) dalam Rahardjo Adisasmita (2005) mengembangkan pemikirannya tentang penyusunan suatu model wilayah perdagangan yang berbentuk segi enam atau heksagonal. Teorinya adalah teori tempat sentral (*central place theory*). Heksagonal yang terbesar memiliki pusat paling kecil. Secara horizontal, model Christaller menunjukkan kegiatan-kegiatan manusia yang tersusun dalam tat ruang geografi dan tempat-tempat sentral (pusat-pusat) yang lebih tinggi ordenya mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas dibandingkan pusat-pusat yang lebih kecil. Sedangkan secara vertical model tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya mensuplai barang-barang ke seluruh wilayah dan kebutuhan akan bahan-bahan mentah di pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya disuplai oleh pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Prinsip pemasaran dengan susunan piramidal pada model tempat sentral dapat menjamin minimisasi biaya-biaya transportasi. Menurut Christaller (1933) dalam Rahardjo Adisasmita (2005) wilayah

pedagangan dapat dilayani sedangkan dalam sebagian dari wilayah-wilayah tersebut tidak sepenuhnya dapat terlayani karena terbatasnya fasilitas transportasi dan hambatan-hambatan geografis.

#### **2.1.1.5 Pengertian Daerah**

Daerah adalah sebutan lingkungan permukaan bumi dalam batas kewenangan pemerintah daerah atau sebutan untuk suatu tempat bila tempat tersebut berkaitan dengan batas administrasi, sedangkan wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi bila tempat tersebut berkaitan dengan pengertian kesatuan geografis dan kawasan adalah sebutan untuk wilayah dalam batas yang ditetapkan berdasarkan fungsi tertentu (Poerwadarmita, 1974).

- Daerah yang homogen merupakan daerah yang didasarkan pada pendapat bahwa daerah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal apabila daerah-daerah tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama. Ciri tersebut dapat bersifat ekonomi, geografi, sosial dan politik.
- Daerah nodal merupakan daerah yang terdiri dari satuan-satuan yang heterogen seperti distribusi penduduk atau manusia yang mengakibatkan lahirnya kota besar, kota madya dan desa. Tetapi heterogenitas tersebut harus saling berhubungan erat secara fungsional.
- Daerah perencanaan merupakan pengelompokan suatu daerah yang didasarkan pada suatu politik atau administrasi, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain.

### **2.1.1.6 Ruang dan Perwilayahan**

Ruang merupakan tempat untuk suatu benda atau kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda atau kegiatan. Unsur-unsur ruang yang akan membentuk atau menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain menurut Robinson Tarigan (2005) adalah :

- Jarak
- Lokasi
- Bentuk
- Ukuran atau skala

Wilayah dalam perencanaan dapat berarti wilayah yang sangat luas dan sangat sempit, sepanjang didalamnya terdapat unsur ruang. Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi atau dikelompokkan ke dalam satu kesatuan agar bias dibedakan dengan kesatuan lain. Dengan demikian perlu diperhatikan apa kondisi umum yang harus dipenuhi. Pengelompokkan tersebut sebenarnya tergantung pada tujuan pengelompokan itu sendiri. Dalam hal ini setiap daerah yang mau dikelompokkan setiap kegiatannya haruslah berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga perubahan di satu region akan berpengaruh terhadap bagian atau unit daerah lainnya. Oleh karena itu, suatu region selalu terdiri dari sekelompok daerah yang letaknya berdekatan satu sama lain, karena faktor jarak sangat mempengaruhi kelancaran dan frekuensi hubungan. Namun, walaupun jaraknya berdekatan harus terdapat hubungan atau ikatan yang erat. Dengan demikian, wilayah tidak perlu harus berdekatan atau bertetangga namun adanya keinginan untuk berhubungan erat tetap merupakan

syarat untuk berhasilnya kerjasama regional. Jenis-jenis perwilayahan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu:

1. Berdasarkan wilayah administratif pemerintahan
2. Berdasarkan kesamaan kondisi
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi
4. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program khusus

#### **2.1.1.7 Penetapan Wilayah Pembangunan**

Menurut Syafrijal (2008), salah satu karakteristik penting dari konsep perencanaan wilayah adalah mempertimbangkan sebanyak mungkin variasi kondisi sosial ekonomi daerah ke dalam perencanaan. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah tersebut terlebih dahulu ditetapkan pengelompokkan wilayah pembangunan baik dalam suatu Negara, provinsi kabupaten maupun kota dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah yang bersangkutan. Penetapan wilayah pembangunan ini perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut dapat ditentukan dengan jelas dan tegas sampai dimana wilayah cakupannya. Wilayah Pembangunan yang merupakan gabungan dari beberapa daerah administrasi mempunyai pusat pertumbuhan yang berfungsi untuk menggerakkan pembangunan di wilayah yang bersangkutan

Penetapan Wilayah Pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu:

1. Kesamaan kondisi permasalahan dan potensi umum daerah baik ekonomi, sosial dan geografi (*Homogeneous Region*)

2. Keterkaitan yang erat antara daerah-daerah yang bergabung dalam Wilayah Pembangunan yang bersangkutan (*Nodal Region*)
3. Kesamaan karakteristik geografis antar daerah yang tergabung dalam Wilayah Pembangunan (Wilayah Fungsional)
4. Kesatuan wilayah administrasi pemerintahan antara provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam Wilayah Pembangunan yang bersangkutan (*Planning Region*)

### **2.1.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai referensi dan pemilihan variabel dan juga menolong dalam penentuan hipotesis. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Iqbal R (2006) dengan judul “Deskripsi Sektor Ekonomi Basis dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Kabupaten Temanggung” dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sektor ekonomi basis mana yang paling potensial dan strategis untuk dikembangkan dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Temanggung serta menganalisis keterkaitan Kabupaten Temanggung dengan daerah sekitarnya sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah kabupaten tersebut.

Penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah di Eks-Karasidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan” yang dilakukan oleh Wiyadi dan Rina Trisnawati (2008) dilakukan untuk mengetahui wilayah mana di Eks-Karasidenan Surakarta yang berpotensi kuat dalam pengembangannya dan untuk mengetahui potensi apa yang memungkinkan

untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penelitian yang berjudul “Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan” yang dilakukan oleh Syahrul Saharudin (2006) bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi regional Sulawesi Selatan, mengetahui sektor basis ekonomi regional Sulawesi Selatan dan lokal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan setelah mengalami proses pembangunan jangka panjang.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

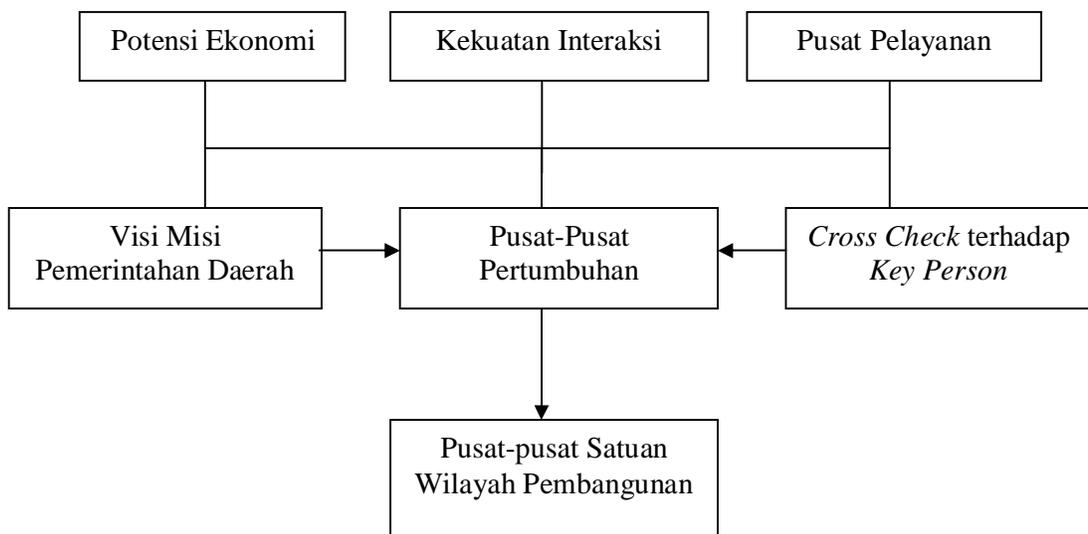
Secara teoritis, pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya sisi sektoral dan juga tidak dari sisi regional atau spasial saja, dimana sisi sektoral dan spasial saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Penetapan Wilayah Pembangunan daerah di Indonesia pada umumnya mengacu pada teori kutub pertumbuhan dengan memperhatikan sektor unggulan dari masing-masing daerah serta kekuatan interaksi antar daerah yang bersangkutan.

Dari sisi sektoral, dalam proses penetapan Wilayah Pembangunan perlu diketahui potensi ekonomi tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal. Potensi daerah tersebut akan diketahui dengan analisis *Location Quotient*. Sementara itu dari sisi regional, penetapan Wilayah Pembangunan dapat dipertimbangkan dengan mengetahui kekuatan interaksi suatu daerah dengan daerah lain serta adanya pusat pertumbuhan. Kekuatan interaksi antar daerah dapat diketahui dengan analisis gravitasi. Sementara itu, pusat pertumbuhan dapat diketahui dengan mengetahui pusat pelayanan melalui metode skalogram yang memberikan

gambaran pertumbuhan suatu daerah berdasarkan tingkat fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu daerah.

Dengan diketahuinya potensi daerah yang terdapat di tiap-tiap kecamatan, kekuatan interaksi antar daerah serta pusat pelayanan di Kabupaten Tegal, dapat ditetapkan pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat wilayah pembangunan yang ditetapkan di Kabupaten Tegal. Untuk menguatkan hasil analisis perlu dilakukan penyesuaian dengan visi misi pemerintah daerah dan melakukan cross check dengan metode wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada *key person* dari pihak pemerintah. Dengan penyesuaian analisis dan *cross check* dan *key person*, maka dapat ditetapkan Pusat Wilayah Pembangunan. Secara ringkas kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi ekonomi yaitu sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis merupakan fungsi dari permintaan yang bersifat eksogeneous atau tidak tergantung pada permintaan lokal (Robinson Tarigan, 2004).
2. Interaksi yaitu hubungan atau kontak yang terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan beserta hasil hubungannya (Bintarto, 1984).
3. Pusat pelayanan yaitu konsentrasi pemukiman penduduk dan beberapa fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial sehingga intensitas kegiatan arus barang dan manusia dari dan ke pusat-pusat tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya (Rahardjo Adisasmita, 2005).

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk menganalisis sistem pasar. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari objek penelitian seperti tingkat pendapatan langsung yang diperoleh dari orang yang bersangkutan (Sonny

Sumarsono, 2004). Data primer yang diambil meliputi pendapat dari *key person* dari pemerintah daerah di Kabupaten Tegal tentang kondisi umum daerah penelitian dan penetapan Wilayah Pembangunan dan Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Tegal.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Data-data yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Tegal seperti Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, PDRB masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal, PDRB per kapita masing-masing kecamatan, jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal.
- Dokumen-dokumen pendukung yang dapat diperoleh dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tegal seperti Rancangan Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal serta peta-peta.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data dengan metode wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula (Sonny Sumarsono, 2004). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi atau memperkuat fakta, untuk meningkatkan kepercayaan atas informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Selain menggunakan metode wawancara, digunakan metode observasi untuk memperoleh fakta-fakta

berdasarkan pengamatan peneliti. Alat-alat yang digunakan dalam observasi antara lain peta lokasi serta izin penelitian.

Untuk memperoleh data sekunder, metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi dipakai data-data dari tahun 2005 sampai dengan 2009 yang bersumber dari dinas-dinas terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA serta dari internet.

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)**

Dalam penelitian ini, metode analisis *Location Quotient* (LQ) dipergunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau unggulan dalam perekonomian masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. Kriterianya adalah :

1. Jika  $LQ > 1$  menunjukkan sektor ke-I di tiap kecamatan tergolong sektor basis, atau sektor I di tiap kecamatan lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Kabupaten Tegal.
2. Jika  $LQ < 1$  menunjukkan sektor ke-i di tiap kecamatan tergolong sektor non basis, atau sektor i di tiap kecamatan kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Kabupaten Tegal.
3. Jika  $LQ = 1$  menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor i di tiap kecamatan, atau sektor i di tiap kecamatan memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Kabupaten Tegal

Formulasi dari analisis *Location Quotient* dalam Wiyadi dan Rina Trisnawati (2002) adalah:

$$LQ = \frac{(v_i \text{ I } v_t)}{(V_i \text{ I } V_t)} \quad \text{atau} \quad LQ = \frac{(Y \text{ sektor A Kecamatan} / PDRB \text{ Kecamatan})}{(Y \text{ sektor A Kabupaten} / PDRB \text{ Kabupaten})} \dots\dots\dots (2)$$

- $v_i$  = pendapatan sektor tertentu di Kecamatan tertentu
- $v_t$  = total PDRB Kecamatan tertentu
- $V_i$  = pendapatan sektor sejenis di Kabupaten Tegal
- $V_t$  = total PDRB Kabupaten Tegal

### 3.4.2 Analisis Gravitasi

Dalam penelitian ini metode analisis gravitasi digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi yang terjadi antar ibukota kecamatan di Kabupaten Tegal. Dari teori gravitasi diterangkan bahwa besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda adalah berbanding terbalik dengan jarak kedua benda pangkat dua (Bintarto, 1984).

Menurut Suwarjoko (1994) dalam Wiyadi dan Rina Trisnawati (2002), formasi yang digunakan adalah:

$$I_{ij} = \frac{\alpha (W_i P_i)(W_j P_j)}{J_{ij}^b} \dots\dots\dots (3)$$

- Dimana  $I_{ij}$  = Interaksi dalam wilayah i dengan j
- $W_i$  = Pendapatan perkapita wilayah i
- $W_j$  = Pendapatan per kapita wilayah j
- $P_i$  = Jumlah penduduk wilayah i
- $P_j$  = Jumlah penduduk wilayah j
- $\alpha$  = Konstanta yang nilainya 1
- $b$  = Konstanta yang nilainya 2

### 3.4.1 Analisis Skalogram

Dalam penelitian ini, metode analisis skalogram digunakan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Amas Yamin, dkk. 2008). Dalam analisis skalogram ini, subjek diganti dengan pusat permukiman (*settlement*), sedangkan objek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk dan jumlah unit serta kualitas fungsi pelayanan yang dimiliki masing-masing daerah kecamatan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram adalah:

1. Kecamatan-kecamatan disusun urutannya berdasarkan peringkat jumlah penduduk.
2. Kecamatan-kecamatan tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki.
3. Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut.
4. Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk analisis meliputi data jumlah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, komunikasi dan data penunjang lainnya. Secara spesifik, data fasilitas yang digunakan antara lain industri, pasar, langgar/mushola, gereja, masjid, TK, SD, SLTP, SLTA, SMK,

perguruan tinggi, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, pondok bersalin  
desa (polindes), pos pelayanan terpadu (Posyandu), hotel, bank, kantor pos.